

TEWASNYA JAMAL KHASHOGGI DAN IMPLIKASINYA BAGI HUBUNGAN LUAR NEGERI ARAB SAUDI

7

Adirini Pujayanti

Abstrak

Tewasnya Jamal Khashoggi, seorang jurnalis oposisi pemerintah Arab Saudi, menjadi perhatian internasional. Kecaman dari banyak pihak pun segera bermunculan dan menyebabkan posisi Pemerintahan Raja Salman di Arab Saudi terpojok secara politik di dunia internasional. Kondisi tersebut mengganggu proses pembangunan dan terlaksananya Visi Saudi 2030, yang diharapkan Arab Saudi akan menjadikan negaranya lebih maju dan moderat. Berbagai upaya dilakukan Arab Saudi untuk memperbaiki reputasinya di dunia internasional. Kasus tewasnya Khashoggi berpengaruh pada konstelasi politik di Timur Tengah dan kondisi politik ekonomi negara-negara mitra Arab Saudi, termasuk Indonesia. Tewasnya Khashoggi juga berpengaruh pada perhatian dunia terhadap kebebasan pers. Polemik paska-tewasnya Khashoggi berimplikasi pada hubungan luar negeri Arab Saudi. Dalam situasi tersebut, upaya soft diplomacy Indonesia terhadap Arab Saudi merupakan langkah tepat tanpa merugikan kepentingan nasional.

Pendahuluan

Pembunuhan keji terhadap jurnalis Jamal Khashoggi, yang dilakukan di Konsulat Arab Saudi di Istanbul Turki pada tanggal 2 Oktober 2018, menimbulkan kecaman internasional. Khashoggi adalah pengkritik keras kebijakan luar negeri dan jaminan kebebasan berpendapat di Arab Saudi. Selama ini, Khashoggi melakukan kritik yang keras dan mendalam terhadap praktik pemerintahan dan perilaku keluarga Raja Saudi. Lebih jauh, Khashoggi telah melontarkan kritik terhadap

langkah reformasi yang dilakukan Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman, yang dinilainya tidak sungguh-sungguh dan penuh kontroversi. Khashoggi juga telah menyebarkan secara luas berita dan mempertanyakan dilakukannya aksi-aksi kekerasan aparat keamanan terhadap para tokoh yang telah memperlihatkan sikap vokal atas keluarga kerajaan. Oleh karena merasa terancam, Khasoggi memilih tinggal di Amerika Serikat (AS), tetapi terus melancarkan kritik melalui media terkemuka, "the Washington Post".



Tekanan internasional dan bukti-bukti yang dikemukakan Pemerintah Turki terkait tewasnya Khashoggi menyebabkan Pemerintah Arab Saudi terpojok dan akhirnya mengakui kejadian tersebut. Jenazah Khashoggi yang hingga kini belum ditemukan diduga telah dimutilasi dan dihancurkan. Kasus tewasnya Khashoggi menjadi langkah mundur bagi upaya modernisasi *Saudi Vision 2030* (Visi Saudi 2030) yang dipelopori Pangeran Mohammed bin Salman. Menurunnya reputasi Arab Saudi saat ini menyebabkan terjadinya perubahan konstelasi politik di Timur Tengah, dan mempengaruhi kondisi politik dan ekonomi negara-negara sekutu dan mitra Arab Saudi selama ini. Bagaimana tewasnya Jamal Khashoggi berpengaruh pada posisi Arab Saudi di dunia internasional dan hubungan bilateral Arab Saudi dengan Indonesia akan dijabarkan dalam tulisan ini.

Hambatan Untuk Visi Saudi 2030

Kasus Khashoggi menjadi ganjalan bagi upaya reformasi Arab Saudi yang dipelopori Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman. Dengan Visi 2030, Arab Saudi tengah melaksanakan reformasi ekonomi dan sosial di dalam negeri yang bertujuan membuat perekonomian negaranya lebih terbuka, terjadi diversifikasi ekonomi negara di sektor non-minyak, dan membangun masyarakat Saudi yang moderat. Ada sejumlah target yang telah dicanangkan agar Arab Saudi setara dengan negara-negara moderat kawasan Teluk seperti Uni Emirat Arab, Qatar, bahkan negara-negara Eropa.

Selaku pemimpin *de facto* Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman menampilkan dirinya sebagai sosok yang reformis. Iklim kondusif

yang diciptakannya membantu menarik minat kalangan bisnis untuk melakukan investasi di Arab Saudi. Namun pasca Khashoggi terbunuh, posisi Arab Saudi di dunia internasional terpojok, kredibilitas Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman sebagai tokoh modernis diragukan, bahkan dianggap pemberi perintah pembunuhan. Sementara itu, keberhasilan pemerintah Turki membuktikan terjadinya pembunuhan Jamal Khashoggi di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, semakin memojokkan posisi pemerintahan Arab Saudi.

Upaya Pemerintahan Raja Salman untuk meraih simpati dan memperbaiki reputasi kerajaan Saudi melalui pertemuan dengan putra Khashoggi juga mendapat kecaman. Ketidakpercayaan terhadap Arab Saudi terlihat dari ketidakhadiran banyak tokoh penting perekonomian dunia dan negara-negara sekutu Arab Saudi dalam konferensi *Future Investment Initiative* (FII) atau "*Davos in the Desert*" di Riyadh belum lama ini. Pihak Uni Eropa dan AS mengancam dan mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Arab Saudi jika tidak mengungkap kasus tersebut. Beberapa negara Eropa dan AS telah mencabut visa bagi 21 warga negara Saudi yang diduga terkait dengan kejahatan itu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui Pelapor Khusus PBB untuk pembunuhan Ekstra Yudisial, Agnes Callamard, menyatakan bahwa pembunuhan Khashoggi sebagai eksekusi kesewenang-wenangan dan kejahatan luar biasa karena dilakukan di kantor Konsulat, dan para tersangka pembunuhan merupakan perwakilan negara. Dewan HAM PBB pun kemudian mendesak Arab Saudi untuk membuka akses bagi penyelidikan pembunuhan Khashoggi oleh tim penyidik

internasional melalui penyelidikan independen.

Kasus Khashoggi mengingatkan dunia akan masih buruknya kebebasan pers di negara-negara Arab. Kematian Khashoggi menambah catatan panjang jurnalis yang kehilangan nyawa karena menyuarkan kebebasan. Meningkatnya penargetan terhadap wartawan yang ditangkap, diusik, dan dibunuh di negara-negara sekutu AS maupun negara-negara demokrasi saat ini cukup memprihatinkan. Pemerintah negara-negara demokratis Eropa dan AS mendapat desakan untuk mengambil sikap mendukung kebebasan pers dan perlindungan terhadap pers. Atas desakan Kongres, Presiden Trump mengirim Direktur CIA Gina Haspel ke Turki untuk penyelidikan dan berjanji akan memberikan sanksi jika Pemerintah Arab Saudi terbukti bersalah.

Pengaruhnya terhadap Politik Internasional

Kasus Khashoggi memalukan bagi Saudi dan membahayakan kebijakan luar negeri AS. Arab Saudi merupakan aktor internasional utama di Timur Tengah dan berperan cukup penting dalam isu Palestina-Israel. Arab Saudi juga merupakan salah satu pembeli senjata terbesar bagi Eropa dan AS. Kasus Khashoggi membuat negara produsen senjata terpaksa menunda penjualan senjata mereka ke negara tersebut. Hal ini menimbulkan gangguan ekonomi dan selisih politik diantara negara Uni Eropa, terutama antara Jerman dengan Perancis yang didukung AS.

Kasus Khashoggi terkait dengan banyak kepentingan nasional AS di Timur Tengah yang sangat besar. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), anggaran militer Arab Saudi

adalah yang terbesar ketiga di dunia pada 2017. Pada tahun tersebut, Arab Saudi menandatangani kesepakatan persenjataan dengan AS senilai US\$110 miliar atau sekitar Rp1.667 triliun, dengan opsi bertambah menjadi lebih dari US\$350 miliar dalam kurun 10 tahun. AS menggambarkan kesepakatan ini sebagai yang terbesar dalam sejarah. Menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi, selain merugikan AS secara ekonomi, juga akan mendorong negara tersebut berpindah pemasok senjata ke Rusia. Jika hal tersebut terjadi, posisi AS dan sekutunya di Timur Tengah akan terancam. Di bidang ekonomi, nilai perdagangan barang dan jasa antara AS dan Saudi mencapai US\$46 miliar atau hampir Rp700 triliun. AS menikmati surplus US\$5 miliar, dan Kementerian Perdagangan AS memperkirakan hubungan dagang kedua negara telah membantu menopang 165.000 lapangan kerja di AS pada 2015.

Arab Saudi merupakan sekutu dekat AS di Timur Tengah, terutama dalam perang melawan terorisme ISIS. Arab Saudi berhasil mendirikan koalisi antiterorisme yang beranggotakan 40 negara Islam. Jika Barat menerapkan sanksi terhadap Saudi, maka kerja sama intelijen dan pertukaran informasi antara Saudi, AS, dan negara-negara Barat lain dikhawatirkan akan berhenti. Hubungan kedua negara juga dibangun atas kepentingan nasional masing-masing. AS membutuhkan minyak Arab Saudi dan kebutuhan Arab Saudi terhadap senjata dan dukungan AS. Oleh karena itu, selama ini AS tidak banyak bersuara terhadap represi di dalam negeri Arab Saudi, maupun intervensi negara tersebut di Yaman dan blokade terhadap Qatar. Dalam konstelasi politik Timur Tengah, keduanya beraliansi untuk mengisolasi musuh bersama, Iran, Suriah, Irak,

Lebanon, dan Bahrain. Rivalitas Arab Saudi dan Iran sangat kuat.

Di Suriah, Saudi mendukung faksi-faksi pemberontak yang mencoba menggulingkan Presiden Bashar al-Assad, sementara Iran, bersama Rusia, membantu pemerintah yang berkuasa. Apabila terjadi ketegangan antara AS dan Arab Saudi, yang diuntungkan adalah Iran. Oleh karena itu, Presiden Trump tidak akan berhenti menjual senjata ke Saudi. Presiden Trump memanfaatkan kasus Khashoggi sebagai kesempatan untuk menekan Arab Saudi untuk lebih banyak membantu AS di Timur Tengah sebagai balasan dukungan AS terhadap pemerintahan Raja Salman. Pragmatisme pemerintahan Trump ini sesuai dengan konsep realisme yang menjadi dasar pemikiran setiap kebijakan luar negeri AS. Kebijakan Pemerintahan Trump mempertegas bahwa dalam hubungan internasional, hubungan antar negara, masalah etik dan moralitas kalah dari kepentingan nasional.

Di lain pihak, kasus Khashoggi mendatangkan keuntungan politik bagi Turki karena popularitas Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meningkat di dunia internasional. Dalam satu dekade terakhir, Arab Saudi dan Turki memiliki perbedaan politik terkait Timur Tengah. Dari kasus ini Presiden Erdogan mendapat reputasi sebagai mitra NATO dan AS. Bukti-bukti penyelidikan pembunuhan Khashoggi milik Pemerintah Turki menjadi modal penting agar Arab Saudi, Uni Eropa, dan AS mau menjalin hubungan yang lebih menguntungkan dengan Turki.

Secara umum upaya memojokkan Arab Saudi di dunia internasional dikhawatirkan akan dibalas dengan embargo minyak oleh negara tersebut. Arab Saudi adalah produsen minyak

terbesar di dunia, dan secara *de facto* memimpin OPEC yang mengontrol pasokan minyak global, yang berarti mengontrol harga dan pasar minyak global. Faktor minyak membuat Saudi sangat diperhitungkan di panggung internasional. Bila Arab Saudi mengurangi produksi minyak, harga minyak dunia akan naik. Kenaikan harga minyak saat perekonomian dunia masih terguncang akibat perang dagang AS-China, dapat mengganggu perekonomian dunia.

Posisi Indonesia

Dalam kunjungan Menteri Luar negeri Arab Saudi Adel Ahmed al-Jubeir ke Indonesia akhir bulan Oktober, Pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinan dan bela sungkawa atas tewasnya Jamal Khashoggi. Indonesia juga mendesak dilakukan penyelidikan yang transparan dan seksama terkait kasus Khashoggi. Kematian Khashoggi bukan hanya tentang kebebasan pers, namun tentang pembunuhan yang kejam. Pemerintah Indonesia menyayangkan adanya pembunuhan kepada wartawan tersebut. Pengungkapan kasus pembunuhan Khashoggi akan memudahkan tindak lanjut langkah-langkah hukum bagi para pelakunya dan memperbaiki reputasi Arab Saudi di mata internasional. Menlu Al-Jubeir memaparkan investigasi kematian Khashoggi yang dilakukan pemerintah Arab Saudi dan menjamin hal serupa tidak akan terjadi lagi.

Kasus Khashoggi secara tidak langsung mempengaruhi hubungan Indonesia dan Arab Saudi. Secara politik Arab Saudi adalah mitra Indonesia dalam upaya mewujudkan kemerdekaan Palestina. Kedua negara berkomitmen terhadap kemerdekaan penuh Palestina melalui solusi dua negara. Posisi Arab Saudi yang

terpojok saat ini akan menghambat peran Arab Saudi dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina dan stabilitas perdamaian di Timur Tengah. Indonesia dan Arab Saudi tengah menyiapkan MOU terkait kerja sama pemberantasan terorisme dan radikalisme yang akan dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan *Presidency of State Security Saudi*. Kerja sama anti terorisme kedua negara cukup penting dalam upaya perang melawan terorisme yang tengah gencar dilakukan Indonesia saat ini.

Di bidang ekonomi kedua negara juga tengah berupaya meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi. Investasi Arab Saudi paska-kunjungan Raja Salman ke Indonesia dianggap masih terlalu rendah. Indonesia melihat potensi ekonomi dengan negara-negara muslim sangat besar namun belum digarap secara optimal. Indonesia juga berkepentingan menjaga hubungan baik dengan Arab Saudi karena terdapat kepentingan perlindungan WNI di Arab Saudi. Populasi WNI yang terdaftar di KBRI mencapai lebih dari 600.000, dan hal ini menyebabkan banyak terjadi permasalahan sosial. Di antaranya terkait PHK tanpa pesangon, dan isu hukuman mati TKI. Pemerintah RI telah seringkali protes karena pelaksanaan hukuman mati terhadap TKI tanpa notifikasi kekonsuleran, seperti yang terjadi pada eksekusi mati terhadap TKI Tuty Tursilawati.

Penutup

Tewasnya Khashoggi berpengaruh pada perubahan politik dan reputasi Arab Saudi di dunia internasional. Kondisi tersebut akhirnya memengaruhi kerja sama internasional Arab Saudi dengan negara-negara mitranya, termasuk Indonesia. Meski

berkepentingan menjaga hubungan bilateral yang harmonis dengan Arab Saudi, Indonesia tidak dapat menutup mata terhadap pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus tersebut. Upaya *soft diplomacy* Pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi terkait kasus Khashoggi merupakan langkah tepat untuk mengingatkan tanpa menimbulkan kesan intervensi politik terhadap masalah domestik Arab Saudi.

Paska kasus Khashoggi berpengaruh pula pada konstelasi politik di Timur Tengah. Melihat besarnya kepentingan Indonesia di Arab Saudi khususnya dan Timur Tengah pada umumnya, DPR perlu mengingatkan pemerintah untuk segera mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat terjadi dan berdampak kurang baik bagi Indonesia. Hubungan bilateral dengan Arab Saudi yang stabil diperlukan mengingat masih ada TKI yang terancam hukuman mati di negara tersebut. Tewasnya Khashoggi juga memperkuat pembahasan mengenai kebebasan pers dan keselamatan wartawan di seluruh dunia.

Referensi

- A. Agus Sriyono, "Pasca Tragedi Khashoggi", *Kompas*, 29 Oktober 2018, hal. 7.
- "Dikecam, Pertemuan Pejabat Saudi-Putra Khashoggi", *Suara Pembaruan*, 24 Oktober 2018, hal. 14.
- "Dunia Terus Tekan Saudi", *Republika*, 26 Oktober 2018, hal. 9.
- "Erdogan: Pembunuhan Khashoggi direncanakan amat Teliti", *Kompas*, 24 Oktober 2018, hal. 1.
- "Erdogan Vows He'll Unveil All To Saudi Case", *The New York Times International*, 23 Oktober 2018, hal. 4.
- "Khashoggi dan Kebebasan Pers", <https://www.suaramerdeka.com/>

index.php/smcetak/baca/136573/khashoggi-dan-kebebasan-pers, diakses 21 Oktober 2018.

“Pangeran Mohammed Diduga Terlibat”, *Suara Pembaruan*, 23 Oktober 2018, hal. 14.

“Pembunuhan Khashoggi Terencana”, *Media Indonesia*, 24 Oktober 2018, hal. 1.

“RI Sampaikan Protes ke Saudi Terkait Eksekusi Tuti Tursilawati”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/30/21314371/ri-sampaikan-protes-ke-saudi-terkait-eksekusi-tuti-tursilawati>, diakses 2 November 2018.

“Utusan PBB Tuding Pemerintah Saudi Terlibat”, *Republika*, 27 Oktober 2018, hal. 9.



Adirini Pujayanti
adirini.pujayanti@dpr.go.id

Dra. Adirini Pujayanti, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional, Universitas Nasional pada tahun 1992 dan pendidikan program Magister (S2) Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia pada tahun 2002. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Kebijakan Luar Negeri Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Manfaatnya Bagi Indonesia” (2015), “Parlemen dan Interfaith Dialogue: Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan dan Perdamaian Dunia” (2015), “Diplomasi Ekonomi Bidang Perdagangan Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo” (2015), dan “Ekonomi Kreatif sebagai Nation Brand Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN” (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.